

**PENYESUAIAN SOSIAL NELAYAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN
JARING CANTRANG**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan dalam Menyelesaikan Program Strata
Satu (S1) Psikologi (S.Psi)



Agasraya Pangudi Luhur
J71214029

**PROGRAM STUDI PSIKOLOGI
FAKULTAS PSIKOLOGI DAN KESEHATAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA
2018**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Penyesuaian sosial nelayan terhadap larangan penggunaan jaring cantrang” merupakan karya asli yang diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Psikologi di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Karya ini sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebut dalam daftar pustaka.

Surabaya, 03, Agustus 2018



Agasraya Pangudi Luhur

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

Penyesuaian Sosial Nelayan Terhadap Larangan Penggunaan Jaring Cantrang

Oleh
Agasraya Pangudi Luhur
J71214029

Telah Disetujui Untuk Diajukan Pada Skripsi

Surabaya, 19 Juli 2018



Nailatin Fauziyah, S. Psi, M. Si
NIP. 197406122007102006

SKRIPSI

PENYESUAIAN SOSIAL NELAYAN TERHADAP LARANGAN
PENGUNAAN JARING CANTRANG

Yang disusun oleh
Agasraya Pangudi Luhur
J71214029

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji
Pada Tanggal 19 Juli 2018



Mengetahui,
Dekan Fakultas Psikologi dan Kesehatan

Dr. dr. Hj. Siti Nur Asiyah, M.Ag^M
NIP. 197209271996032002

Susunan Tim Penguji
Penguji I/Pembimbing,

Nailatin Fauziah, S.Psi., M.Si
NIP. 197406122007102006

Penguji II

Dra. Hj. Siti Azizah Rahayu, M.Si
NIP. 195510071986032001

Penguji III

Soffy Balqes, M.Psi
NIP. 197609222009122001

Penguji IV

Tatik Mukhoyaroh, S.Psi., M.Si
NIP. 197605112009122002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : AGASRAYA PANGUDI LUHUR
NIM : J7124029
Fakultas/Jurusan : PSIKOLOGI DAN KESEHATAN/PSIKOLOGI
E-mail address : agasraya9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

PENYESUAIAN SOSIAL NELAYAN TERHADAP LARANGAN PENGGUNAAN
JARING CANTRANG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2018

Penulis


Agasraya Pangudi Luhur

penangkapan ikan merusak yang menggunakan alat tangkap terlarang sehingga mengganggu perkembangbiakan ikan yang ada di laut.

Di Indonesia terdapat berbagai macam penangkapan ikan, mulai dari alat tangkap yang ramah lingkungan seperti *gill nets* dan jaring insang, juga alat tangkap yang tidak ramah lingkungan atau mengancam kelestarian ekosistem laut antara lain pukat tarik (*Seine Nets*) dan ~~l unau~~ Hela (*Trawls*) atau yang sering disebut dengan cantrang. Diketahui bahwa alat tangkap tersebut merupakan salah satu penyebab terancamnya kelestarian laut dan ikan yang ada karena ikan yang bukan target termasuk ikan kecil juga ikut tertangkap. Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat (Kominfo.go.id).

Dampak buruk dari penggunaan alat tangkap cantrang seperti dilaporkan dari (Kumparan.com) antara lain:

1. Hasil tangkapan cantrang tidak selektif dengan komposisi hasil tangkapan yang menangkap semua ukuran ikan, udang, kepiting, serta biota lainnya. Biota-biota yang belum matang gonad dan memijah yang ikut tertangkap tidak dapat berkembang biak menghasilkan individu baru. Kondisi ini menyebabkan deplesi stok atau

pengurangan stok sumber daya ikan, hasil tangkapan akan semakin berkurang.

2. Biota yang dibuang akan mengacaukan data perikanan karena tidak tercatat sebagai hasil produksi perikanan. Analisis stok sumber daya perikanan pun menjadi kurang akurat sehingga menyebabkan tidak sesuai kebijakan pengelolaan dan kenyataan kondisi sumber daya perikanan.
3. Pengoperasian cantrang yang mengeruk dasar perairan dalam dan pesisir tanpa terkecuali terumbu karang dan merusak lokasi pemijahan biota laut. Meskipun Cantrang menghindari Terumbu Karang, tetapi kelompok-kelompok kecil karang hidup yang berada di dasar perairan akan ikut tersapu.
4. Sumber daya ikan di perairan laut Indonesia akan mengalami degradasi dikarenakan padatnya aktivitas penangkapan dari berbagai daerah termasuk dalam penggunaan alat tangkap cantrang. *Fishing ground* (lokasi penangkapan) nelayan akan ikut berpindah dan menjauh, serta biaya operasional penangkapan semakin tinggi.

Selain dampak ekologi terdapat juga dampak sosial bagi nelayan cantrang dengan masyarakat sekitar dan juga kelompok nelayan yang lain. Menurut Kusnandar dalam (Cahyani, 2013) konflik horizontal antara nelayan yang pro cantrang dengan yang tidak pro dengan cantrang tentu akan muncul. Untuk konflik terhadap nelayan lain tentunya akan menimbulkan kecemburuan sosial akibat hasil tangkapan, dimana

nelayan yang menggunakan jaring tradisional ataupun alat tangkap berupa pancing akan mendapatkan hasil yang lebih sedikit dari pada nelayan yang menggunakan cantrang. Konflik dengan masyarakat juga akan timbul sebab dalam perspektif masyarakat nelayan cantrang dirasa sama sekali tidak memperdulikan soal kelestarian alam dan masa depan kelautan negara.

Kelestarian laut sebagian besar tergantung pada nelayan karena sebagai pelaku yang langsung terlibat dengan laut. Menurut Imron dalam, Mulyadi (2007) nelayan adalah suatu kelompok masyarakat yang kehidupannya tergantung langsung pada hasil laut, baik dengan cara melakukan penangkapan ataupun budidaya. Mereka pada umumnya tinggal di pinggir pantai, sebuah lingkungan pemukiman yang dekat dengan lokasi kegiatannya. Oleh karena itu nelayan adalah kelompok yang paling terkait dengan perubahan-perubahan yang ada di laut.

Pada tanggal 9 Januari 2015, Menteri Kelautan Perikanan telah mengundang Peraturan Menteri Nomor 2/PERMEN-KP/2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan Pukat Hela (*Trawls*) dan pukat tarik (*Seine Nets*) termasuk cantrang, resmi diberlakukan mulai 1 Januari 2018 di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Penetapan kebijakan pelarangan alat tangkap tersebut juga didasarkan oleh kondisi perikanan Indonesia yang mulai menurun setiap tahun. Turunnya hasil produksi perikanan diakibatkan adanya kerusakan

ekosistem laut seperti padang lamun maupun terumbu karang (Andryana, 2016).

Hal itu pun langsung di respon oleh banyak nelayan hingga Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) mengadakan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu, 17 Januari 2018 untuk membahas penggunaan cantrang. Dari hasil pertemuan di Istana disepakati cantrang tetap dilarang, namun nelayan diberikan kesempatan beralih alat tanpa diberi batasan waktu. Selama peralihan alat, para nelayan sementara diizinkan untuk menggunakan cantrang (news.liputan6.com) yang dalam artian cantrang dilegalkan atau boleh digunakan kembali.

Aturan Mengenai Pelarangan Pukat Hela dan sebagainya bukanlah aturan baru yang serta merta dikeluarkan oleh Menteri Perikanan dan Kelautan, Aturan tersebut keluar sebagai Amanah dari UU No 31 tahun 2004 Tentang Perikanan juncto UU No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan UU No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan dimana dalam Pasal 9 Ayat (1) UU tersebut disebutkan: “Setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia“. Pukat Hela (*Trawls*) dan Pukat Tarik (*Seine Nets*) adalah salah satu dari Alat tangkap

yang sesuai sifatnya dikategorikan sebagai alat tangkap yang merusak lingkungan.

Meski cantrang diperbolehkan kembali, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan penggunaan alat untuk menangkap ikan itu hanya diizinkan di Laut Jawa. Susi menjelaskan, banyak pertimbangan mengapa cantrang hanya boleh digunakan di Laut Jawa. Salah satunya karena populasi nelayan cantrang juga paling banyak di pantai utara Jawa (bisnis.tempo.co). Wilayah tersebut meliputi Batang, Kota Tegal, Rembang, Pati, Junawa, dan Lamongan. Enam wilayah tersebut bukan berarti dibebaskan oleh Menteri Susi akan tetapi tetap harus ada iktikat untuk mengganti jaring cantrang menjadi jaring yang ramah lingkungan, dikarenakan cantrang tetaplah alat tangkap yang mengancam kelestarian ekosistem laut.

Dengan adanya larangan penggunaan cantrang dan beralih ke alat penangkap ikan lainnya dapat meningkatkan penghasilan para nelayan. Meskipun jumlah tangkapan ikan memang menurun karena alat tangkap yang digunakan lebih selektif, namun nilai produksinya justru melonjak. Permasalahan terkait dampak buruk penggunaan cantrang tidak bisa diselesaikan saat ini karena menteri Perikanan dan Kelautan resmi kembali memperbolehkan cantrang tetapi hanya sebagai masa peralihan.

Bagi para nelayan adanya peraturan larangan penggunaan alat tangkap cantrang dapat menimbulkan gejolak bagi para nelayan, sebab

cantrang adalah alat yang setiap harinya digunakan oleh nelayan dalam bekerja. Saat cantrang dilarang maka nelayan akan kebingungan dan merasa khawatir terhadap pekerjaan yang dialaminya.

Para nelayan yang menggunakan cantrang bukan terbebas dari aturan tersebut, tetapi nelayan tetap diharuskan untuk menyesuaikan diri dengan aturan tersebut. Untuk wilayah-wilayah tertentu para nelayan sudah bisa menyesuaikan dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah dengan mengganti jaring yang direkomendasikan oleh pemerintah karena para nelayan di daerah tersebut sadar akan kerusakan ekosistem yang ditimbulkan oleh alat tangkap seperti cantrang. Penyesuaian terhadap alat tangkap yang ramah lingkungan harus segera dilakukan oleh beberapa daerah yang mendapatkan perpanjangan waktu dikarenakan sudah banyak wilayah yang sudah beralih ke alat tangkap ramah lingkungan otomatis aturan tersebut memang menjadi kesepakatan oleh banyak pihak nelayan dan mengharuskan nelayan yang masih menggunakan cantrang agar menyesuaikan alat tangkap seperti kebanyakan nelayan yang lain sesuai dengan kesepakatan kebanyakan nelayan di Indonesia.

Interaksi antara manusia dengan lingkungan seperti yang di kemukakan oleh Kurt Lewin, bahwa Perilaku merupakan fungsi dari lingkungan dan organisme. Lebih dalam seperti yang dijelaskan oleh (Hawley dalam Himmam & Faturochman, 1995) bahwa perilaku manusia merupakan bagian dari kompleksitas ekosistem yang dalam artian terdapat interaksi timbal balik yang menguntungkan antara manusia –

lingkungan. Maka interaksi manusia dengan lingkungannya haruslah bersifat dinamis agar manusia dan lingkungan dapat memberikan timbal balik yang positif. Karena itu manusia dituntut untuk menyesuaikan dengan lingkungan dan kondisi sosial yang ada agar terciptanya dinamisasi yang baik dengan sesama maupun dengan lingkungannya.

Menurut Mu'tadin (2002), penyesuaian sosial adalah kemampuan untuk mematuhi norma-norma dan peraturan sosial kemasyarakatan. Dapat dipahami bahwa yang dimaksud penyesuaian sosial adalah kemampuan individu dalam mereaksi tuntutan-tuntutan sosial secara tepat dan wajar. Sikap nelayan cantrang dalam mereaksi tuntutan-tuntutan norma sosial yang berlaku tentunya menjadi hal yang mesti dilakukan sebab norma sosial adalah sebuah aturan yang melandasi sikap dari sebuah masyarakat maka nelayan cantrang diharuskan untuk menyesuaikan norma yang sudah berlaku di lingkungan tersebut.

Hurlock (1977) mengungkapkan bahwa penyesuaian sosial adalah keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan diri terhadap orang lain pada umumnya dan kelompok pada khususnya. Nelayan cantrang dikatakan berhasil melakukan penyesuaian sosial ketika dia mempunyai usaha untuk mengganti alat tangkap yang sesuai dengan aturan pemerintah maupun keinginan kebanyakan kelompok nelayan yang lain. Lebih lanjut Eysenk (dalam Wardani & Apollo, 2010) menyatakan bahwa penyesuaian sosial sebagai suatu proses belajar, yaitu belajar memahami, mengerti, dan berusaha untuk melakukan apa yang diinginkan oleh

individu itu sendiri maupun lingkungannya. Upaya untuk mengganti alat tangkap cantrang ke alat tangkap ramah lingkungan tentunya harus hadir dari dalam diri orang itu sendiri karena upaya tersebut adalah bentuk dari proses memahami dan mencoba mengerti tentang kondisi lingkungan yang ada.

Schneiders, (1964) menyebutkan bahwa penyesuaian sosial merupakan kemampuan untuk bereaksi secara efektif dan sehat terhadap situasi, realitas dan relasi sosial sehingga tuntutan hidup bermasyarakat dipenuhi dengan cara yang dapat diterima dan memuaskan. Pentingnya mereka menjalin penyesuaian sosial tersebut adalah untuk menjaga agar tidak terjadi konflik yang mungkin saja timbul akibat proses dan cara menyesuaikan diri yang salah dan tidak bisa diterima oleh pemerintah, terlebih kelompok nelayan yang lain yang merasa dirugikan. Keadaan ini harus disadari menyimpan potensi besar terhadap timbulnya pertengkaran antar kelompok nelayan yang satu dengan yang lain.

Scheneiders (1964) mengemukakan beberapa kriteria penyesuaian yang tergolong baik (*good adjustment*) ditandai dengan adanya tanggung jawab sosial. Penyesuain yang baik terlihat dari bagaimana seseorang dapat merespon sebuah permasalahan dengan baik dalam situasi apapun. Sebagai makhluk sosial memang sudah seharusnya mempunyai tanggung jawab sosial, dalam artian bertanggung jawab atas pemberdayaan atau pengelolaan pada makhluk maupun lingkungan yang ditempatinya. Penyesuaian sosial tentunya tidak mudah dilakukan oleh nelayan

E. Keaslian Penelitian

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dilakukan terdapat keterkaitan dengan judul penelitian “Penyesuaian sosial nelayan terhadap larangan penggunaan jaring cantrang” adalah sebagai berikut:

1. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diambil peneliti adalah jurnal yang berjudul “*Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Ekologi*” yang ditulis oleh Helmi A. dan Arif Satria, jurnal Sosial Humaniora tahun 2012. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurunnya keanekaragaman ikan, memengaruhi mata pencaharian masyarakat serta menurunnya kesempatan berusaha. Strategi adaptasi yang dilakukan masyarakat Pulau Panjang lebih didominasi pola-pola adaptasi yang bersifat reaktif, meliputi penganeekaragaman mata pencaharian, penganeekaragaman alat tangkap, perubahan daerah tangkapan, memanfaatkan hubungan sosial, dan memobilisasi anggota rumahtangga.

Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan dari penelitian ini adalah lebih berfokus pada bagaimana strategi adaptasi nelayan terhadap perubahan ekologi serta sejauh mana dampak perubahan ekologis terhadap nelayan. Penelitian ini menambah pengetahuan terkait perubahan ekologis yang terjadi di daerah pesisir serta berbagai

macam strategi adaptasi yang dilakukan nelayan untuk menghadapi kondisi tersebut

2. Penelitian lain yang juga relevan dengan judul yang diambil peneliti adalah Tesis yang berjudul "*Kajian Penggunaan Cantrang Terhadap Kelestarian Sumberdaya Ikan Demersal (Analisis Hasil Tangkapan Dominan yang Didaratkan di TPI Wedung Demak)*" yang ditulis oleh Cahyani R.T, Universitas Diponegoro, Semarang, Tahun 2013. Hasil analisis Schaeffer menunjukkan bahwa MSY sebesar 854,07 ton dengan upaya tangkap optimum sebesar 831 unit cantrang. Tingkat pemanfaatan perikanan demersal cantrang sebesar 80,47%. Cantrang rata-rata berukuran mata jaring 1,5 inci dan kapal berukuran 5-10 GT. Dari hasil penelitian didapatkan 5 jenis ikan yang dominan yaitu petek (*Leiognathus* sp), layur (*Trichiurus* sp), tigawaja (*Scianidae* sp), kuniran (*Upeneus* sp) dan swanggi (*Priacanthus* sp). Ikan petek mendominasi 29,5%. Pola pertumbuhan ikan rata-rata bersifat allometrik dengan nilai faktor kondisi berkisar 1. Nisbah kelamin rata-rata seimbang. Dari rata-rata panjang dan berat ikan demersal hasil tangkapan cantrang diketahui banyak ikan-ikan yang berukuran kecil ikut tertangkap. TKG ikan petek dominan pada tingkat III, ikan layur dan ikan tigawaja TKG IV, ikan kuniran dan swanggi pada TKG I. Fekunditas tertinggi terlihat pada ikan petek yakni sebesar 15.900 untuk jantan dan 12.700 butir.

Berdasarkan pemaparan di atas terlihat bahwa penelitian cantrang dilakukan terbatas hanya pada aspek kelayakan usaha/dari sisi ekonomi dan teknis. Namun belum ada publikasi mengenai aspek upaya pengelolaan ikan hasil tangkapan cantrang yang berkaitan dengan keberlanjutannya berdasarkan pertimbangan dimensi ekologi ikan hasil tangkapan terutama di Kabupaten Demak.

3. Penelitian terdahulu yang juga diambil peneliti adalah jurnal dari Wasito D.R, dkk yang berjudul “Penyesuaian Sosial Remaja Tuna Rungu yang Bersekolah”. Hasil penelitian menunjukkan semua subjek memiliki kemampuan penyesuaian sosial yang efektif. Subjek pertama dapat menyesuaikan diri, meskipun harus menghadapi tantangan dari teman-teman. Subjek kedua memiliki pribadi yang introvert. Sekalipun demikian ia tetap dapat menyesuaikan diri dengan baik. Subjek ketiga bahkan dapat berkomunikasi dengan lancar dan memiliki etos kerja yang tinggi di Sekolah Umum.

Perbedaan dari penelitian ini adalah subyek yang teliti. Sedangkan persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama menggunakan teori penyesuaian sosial.

4. Penelitian terdahulu yang sesuai dengan judul yang diambil peneliti adalah jurnal dari Amaliah R. dan Indri kemala nasution, yang berjudul “Gambaran Penyesuaian Sosial Pada Remaja Penderita Sinusitis Kronis” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipan 1 yang menderita sinusitis kronis mengalami hambatan dalam melakukan

penyesuaian sosial di lingkungan sekolah dan masyarakat dikarenakan adanya perasaan malu untuk menjalin hubungan dengan oranglain. Namun partisipan 1 tersebut mampu melakukan penyesuaian sosial di lingkungan keluarga dengan baik karena adanya dukungan serta perhatian dari anggota keluarga. Partisipan 2 yang mengalami penyakit sinusitis kronis, dapat mengatasi segala hambatan dalam melakukan penyesuaian sosial di lingkungan keluarga, sekolah serta masyarakat. Lingkungan yang positif dalam menanggapi penyakit sinusitis kronis serta adanya dukungan serta perhatian dari beberapa pihak membuat partisipan 2 tersebut dapat dengan baik melakukan penyesuaian sosial meskipun dengan kondisi penyakit sinusitis kronis.

Perbedaan penelitian ini dengan yang ditulis oleh peneliti adalah subyek yang digunakan, dimana subyek penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah nelayan yang menggunakan cantrang.

5. Penelitian terdahulu dengan judul yang diambil peneliti adalah jurnal dari Krisyogi S. dan Yohaniz Franz, yang berjudul “Pengalaman Penyesuaian Sosial Mahasiswa Etnis Papua Di Kota Semarang” Hasil penelitian ini menunjukkan pemaknaan kehidupan subjek melalui membenahan diri. Puncak dari pemaknaan tersebut adalah kepedulian sosial serta berbagi pengalaman membenahan diri melalui kehidupan spiritual terhadap komunitas seetnis.

Perbedaan penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah subyek yang digunakan, peneliti menjadikan nelayan sebagai subyek yang akan diteliti.

6. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diambil peneliti adalah Skripsi dari Diandra Wardhani A.C, yang berjudul “Penyesuaian Sosial Pada Siswa Akselerasi” hasil dari penelitian ini adalah Proses penyesuaian sosial pada siswa akselerasi adalah cenderung sempat merasakan stress, namun kemudian mencoba menyesuaikan pola belajar yang berbeda dari sebelumnya, karena tuntutan waktu yang ada di kelas akselerasi. Artinya, siswa akselerasi harus bisa menyesuaikan diri dengan tuntutan yang ada di lingkungannya. Siswa akselerasi juga menyadari bahwa harus tetap menghormati orang lain, yaitu dengan cara menghargai orang lain, menyapa, memberikan senyuman, dan bersikap sopan dengan orang lain. Ketika berinteraksi dengan teman di luar kelas, siswa akselerasi tetap berusaha bisa berteman atau bersikap sopan. Hal ini menunjukkan bahwa adanya keinginan siswa akselerasi untuk tetap menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan sekitar.

Perbedaan dengan penelitian ini adalah penyesuaian sosial yang digunakan di khususkan di lingkup pendidikan sedangkan yang digunakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berada di lingkup masyarakat.

7. Penelitian terdahulu yang juga relevan dengan judul yang diambil peneliti adalah jurnal dari Nurhushni, P.A dengan judul “Profil Penyesuaian Sosial Remaja Yang Mengalami Kecanduan Mengakses Facebook” Hasil dari penelitian tersebut adalah Kemampuan penyesuaian sosial remaja yang berada dalam kategori sedang dapat juga diartikan bahwa remaja masih cukup terampil dalam melakukan penyesuaian sosial meskipun beberapa diantaranya menunjukkan bahwa remaja yang kecanduan mengakses facebook memiliki kemampuan penyesuaian sosial dalam kategori rendah atau kurang terampil. Hasil penelitian juga menunjukkan kemampuan penyesuaian remaja (siswa SMP) terhadap kegiatan ekstrakurikuler merupakan aspek penyesuaian sosial remaja dengan tingkat ketercapaian paling rendah.

Perbedaan di penelitian ini dengan yang dilakukan oleh peneliti adalah fokus penelitian yang diteliti, penelitian yang dilakukan diatas berfokus pada kecanduan remaja terhadap facebook sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berfokus pada larangan penggunaan cantrang pada nelayan.

8. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diambil peneliti adalah jurnal dari Minarsih U.W, dan Dea Asri Oktiarini, dengan judul “Gambaran Penyesuaian Sosial Pada Mahasiswa Thailand di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (Studi Fenomenologi Pada Mahasiswa Thailand Tingkat Awal Di Universitas Muhammadiyah

Purwokerto)” Hasil penelitian menunjukkan: 1) Penyesuaian sosial mahasiswa Thailand yaitu dengan memenuhi harapan dari lingkungan universitas dengan mengikuti peraturan, kebiasaan dan norma yang ada dilingkungan universitas. Menyesuaikan diri dengan kelompok, hal ini dimulai dengan kelompok teman sebaya, serta berfikir makna dari yang diucapkan oleh teman saat kesulitan mengartikan bahasa. 2) Kesulitan yang dialami mahasiswa Thailand dalam penyesuaian sosial dengan lingkungannya terutama di perkuliahan baik dengan teman maupun dosen, mengalami kesulitan memahami bahasa Indonesia, sehingga berdampak pada kepuasan pribadi dalam hal prestasi rendah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah subyek yang diteliti, dimana subyek bukan gambaran penyesuaian sosial terhadap mahasiswa, tetapi penyesuaian sosial pada nelayan terkait larangan penggunaan cantrang.

9. Penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diambil peneliti adalah jurnal dari Gunarta M.E dengan judul “Konsep Diri, Dukungan Sosial dan Penyesuaian Sosial Mahasiswa Pendatang Di Bali” Hasil penelitian menunjukkan nilai $F = 11,277$, pada $p = 0,000$ ($p < 0,01$). Artinya adalah ada hubungan konsep diri dan dukungan sosial dengan penyesuaian sosial mahasiswa di Bali. Diperoleh $R^2 = 0,264$ artinya penyesuaian sosial mahasiswa pendatang dijelaskan dengan variabel konsep diri dan dukungan sosial. Hasil analisa uji t menunjukkan tidak

Penyesuaian sosial didefinisikan (Mu'tadin 2002) sebagai suatu proses saling mempengaruhi antar individu yang menghasilkan suatu pola kebudayaan dan tingkah laku yang sesuai dengan aturan, hukum, adat dan nilai-nilai yang dipatuhi, demi tercapainya penyelesaian bagi persoalan-persoalan hidup.

Menurut (Mu'tadin, 2002) individu juga mempelajari keterampilan-keterampilan sosial yang diperlukan dalam penyesuaian sosial, meliputi:

- a. Kemampuan berkomunikasi
- b. Menjalin hubungan dengan orang lain
- c. Menghargai diri sendiri dan orang lain
- d. Mendengarkan pendapat dan keluhan dari orang lain
- e. Memberi dan menerima kritik
- f. Bertindak sesuai norma dan aturan yang berlaku

Gerungan (1996) menyatakan bahwa penyesuaian sosial merupakan usaha yang dilakukan individu untuk mengubah diri dan keinginan agar sesuai dengan keadaan lingkungan atau kelompok.

Berdasarkan beberapa definisi penyesuaian sosial yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan penyesuaian sosial adalah kemampuan seseorang untuk berperilaku sesuai dengan harapan orang lain, yang ditunjukkan dengan memperlihatkan sikap dan tingkah laku yang menyenangkan, serta dapat berinteraksi dengan orang lain sehingga mampu merasa puas terhadap dirinya dan orang lain.

memiliki ketertarikan untuk berpartisipasi dengan aktivitas dilingkungkannya serta tidak mampu untuk mengekspresikan diri mereka sendiri, sedangkan bentuk penyesuaian akan dikatakan baik apabila individu tersebut mampu menciptakan relasi yang sehat dengan orang lain, mengembangkan persahabatan, berperan aktif dalam kegiatan sosial, serta menghargai nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat.

- c. *Social approval* adalah minat dan simpati terhadap kesejahteraan orang lain.

Hal ini dapat merupakan bentuk penyesuaian diri dimasyarakat, dimana individu dapat peka dengan masalah dan kesulitan orang lain disekelilingnya serta bersedia membantu meringankan masalahnya. Selain itu individu juga harus menunjukkan minat terhadap tujuan, harapan dan aspirasi, cara pandang ini juga sesuai dengan tuntutan dalam penyesuaian keagamaan (*religious adjustment*).

- d. *Altruisme* adalah memiliki sifat rendah hati dan tidak egois.

Rasa saling membantu dan mementingkan orang lain merupakan nilai-nilai moral yang aplikasi dari nilai-nilai tersebut merupakan bagian dari penyesuaian moral yang baik yang apabila diterapkan dimasyarakat secara wajar dan bermanfaat maka akan membawa pada penyesuaian diri yang kuat. Bentuk dari sifat-sifat tersebut memiliki rasa kemanusiaan, rendah diri, dan kejujuran dimana

yang mencakup, menangkap, membudidayakan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersial.

Menurut Wahyuningsih dkk (1997) masyarakat nelayan dapat di bagi menjadi tiga jika dilihat dari segi kepemilikan modal, yaitu:

1. Nelayan juragan, nelayan ini merupakan nelayan pemilik perahu dan alat penangkapan ikan yang mampu mengubah para nelayan pekerja sebagai pembantu dalam usahanya menangkap ikan di laut. Nelayan ini memiliki tanah yang digarap pada musim paceklik. Nelayan juragan ada tiga macam yaitu nelayan juragan laut, nelayan juragan darat yang mengendalikan usahanya dari darat, dan orang yang memiliki perahu, alat penangkap ikan dan uang tetapi bukan nelayan asli yang disebut tauke (toke) atau cakong.
2. Nelayan pekerja, nelayan yang tidak memiliki alat produksi dan modal, tetapi memiliki tenaga yang dijual kepada nelayan juragan untuk membantu menjalankan usaha penangkapan ikan di laut, nelayan ini disebut juga nelayan penggarap atau sawi (awak perahu nelayan). Juragan dalam hal ini berkewajiban menyediakan bahan makanan dan bahan bakar untuk keperluan operasi penangkapan ikan, dan bahan makanan untuk dapur keluarga yang ditinggalkan selama berlayar. Hasil tangkapan di laut dibagi menurut peraturan tertentu berbeda-beda antara juragan yang lainnya setelah dikurangi biaya produksi.
3. Nelayan pemilik, merupakan nelayan yang kurang mampu. Nelayan ini hanya mempunyai perahu kecil untuk keperluan dirinya sendiri dan

alat penangkapan ikan sederhana, karena itu disebut juganelayan perorangan atau nelayan miskin. Nelayan ini tidak memiliki tanah untuk digarap pada musim paceklik.

Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa nelayan adalah suatu komunitas yang mana mata pencaharian utamanya adalah menangkap ikan, baik di laut, selat, teluk, danau maupun sungai dengan menggunakan perahu atau kapal dan berburu atau menggunakan alat tangkap seperti pancing, jala atau jaring. Nelayan pun di klarifikasikan menjadi tiga macam yakni nelayan juragan, pekerja, dan pemilik.

2. Cantrang

Cantrang merupakan alat penangkapan ikan yang bersifat aktif dengan pengoperasian menyentuh dasar perairan. Cantrang dioperasikan dengan menebar tali selambar secara melingkar, dilanjutkan dengan menurunkan jaring cantrang, kemudian kedua ujung tali selambar dipertemukan. Kedua ujung tali tersebut kemudian ditarik ke arah kapal sampai seluruh bagian kantong jaring terangkat (kominfo, 2017).

Penggunaan tali selambar yang mencapai panjang lebih dari 1.000 m (masing-masing sisi kanan dan kiri 500 m) menyebabkan sapuan lintasan tali selambar sangat luas. Ukuran cantrang dan panjang tali selambar yang digunakan tergantung ukuran kapal. Pada kapal berukuran diatas 30 Gross Ton (GT) yang dilengkapi dengan ruang penyimpanan berpendingin (*cold storage*), cantrang dioperasikan dengan tali selambar

sepanjang 6.000 m. Dengan perhitungan sederhana, jika keliling lingkaran 6.000 m, diperoleh luas daerah sapuan tali selambar adalah 289 Ha. Penarikan jaring menyebabkan terjadi pengadukan dasar perairan yang dapat menimbulkan kerusakan dasar perairan sehingga menimbulkan dampak signifikan terhadap ekosistem dasar bawah laut (kominfo, 2017).

Berdasarkan hasil penelitian di Brondong - Lamongan (IPB, 2009) hanya 51% hasil tangkapan cantrang yang berupa ikan target, sedangkan 49% lainnya merupakan non target. Adapun hasil penelitian di Tegal Undip tahun 2008 bahwa, penggunaan cantrang hanya dapat menangkap 46% ikan target dan 54% lainnya non target yang didominasi ikan rucah. Ikan hasil tangkapan cantrang ini umumnya dimanfaatkan pabrik surimi dan dibeli dengan harga maksimal 5000/kg. Sedangkan tangkapan ikan non target digunakan sebagai pembuatan bahan tepung ikan untuk pakan ternak.

C. Kebijakan Larangan Penggunaan Cantrang

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Sedangkan definisi kebijakan yang diajukan oleh Heinz Eulau dan Kenneth Prewitt bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan (*repetitiveness*) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut (Jones, 1996).

Sebuah kebijakan lahir karena ada suatu masalah yang hendak dipecahkan (Abidin, 2004). Oleh karena itu, kebijakan merupakan alat atau cara untuk memecahkan masalah yang sudah ada sehingga dalam hal ini yang menjadi dasar pembuatan kebijakan adalah masalah. Jika tidak ada masalah tidak perlu ada suatu kebijakan baru.

Untuk perbaikan atau pemulihan habitat dan stok sumber daya ikan di Indonesia, Menteri Kelautan dan Perikanan mengeluarkan sebuah kebijakan yaitu berupa peraturan yang mana salah satunya tertuang dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No.2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Alat penangkapan ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda lain-lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.

Terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 2 Tahun 2015 tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan pukat hela (*trawls*) dan pukat tarik (*seine nets*) menegaskan pentingnya perhatian atas daya dukung dan kelestarian sumber daya perikanan untuk dimanfaatkan sebesar besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Hal itu sejalan dengan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No 45 Tahun 2009 tentang perikanan (Villagerspot, 2016).

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tahun 2012, jumlah alat tangkap yang digunakan untuk beroperasi di

wilayah perairan Indonesia sekitar 1,177 juta unit. Dari data tersebut sebanyak 1,66% atau sebanyak 19.544 unit merupakan alat tangkap pukot tarik atau disebut dengan cantrang. Kebijakan ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat nelayan yang ada di Indonesia dalam pengelolaan perikanan yang bertanggung jawab. Alat penangkapan ikan pukot hela (*trawls*) dan pukot tarik (*seine nets*) merupakan alat tangkap ikan yang tidak selektif. Pukot hela (*trawls*) merupakan kelompok alat penangkapan ikan yang terbuat dari jaring berkantong yang dilengkapi dengan atau tanpa alat pembuka mulut jaring dan pengoperasiannya dengan cara dihela di sisi atau di belakang kapal yang sedang melaju. Selain itu pengoperasiannya juga dilakukan pada kolom maupun dasar perairan, umumnya alat tangkap tersebut digunakan untuk menangkap ikan pelagis maupun ikan demersal termasuk udang. Pukot hela dasar dioperasikan di dasar perairan, umumnya untuk menangkap ikan demersal, udang dan crustacea lainnya. Sedangkan pukot hela pertengahan dioperasikan di kolom perairan dan umumnya digunakan untuk menangkap ikan pelagis.

Pukot tarik (*seine nets*) merupakan alat penangkapan ikan berkantong tanpa alat pembuka mulut jaring, pengoperasiannya dengan cara melingkari gerombolan ikan lalu menariknya ke kapal yang sedang berhenti melalui tali selambar di kedua bagian sayapnya. Selain itu, pengoperasiannya juga dilakukan pada permukaan, kolom maupun dasar perairan dan alat penangkapan ikan ini digunakan untuk menangkap ikan

damersal dan ikan pelagis tergantung jenis pukat tarik yang digunakan. Pukat tarik pantai dioperasikan di daerah pantai untuk menangkap ikan pelagis dan demersal yang hidup di daerah pantai. Dogol dan lampara dasar dioperasikan pada dasar perairan, umumnya digunakan untuk menangkap ikan damersal dan payang dioperasikan di kolom perairan yang umumnya digunakan untuk menangkap ikan pelagis (Firhat, 2016).

Terdapat beberapa kriteria alat tangkap yang diperbolehkan oleh Pemerintah (ramah lingkungan) serta alat tangkap yang dilarang oleh Pemerintah. Food Agriculture Organization (FAO, sebuah lembaga di bawah naungan Perserikatan Bangsa Bangsa yang menangani masalah pangan dan pertanian dunia), pada tahun 1995 mengeluarkan suatu tata cara bagi kegiatan penangkapan ikan yang bertanggung jawab (*Code of Conduct for Responsible Fisheries – CCRF*). Dalam CCRF ini, FAO menetapkan serangkaian kriteria bagi teknologi penangkapan ikan ramah lingkungan diantaranya; alat tangkap harus memiliki selektivitas yang tinggi, tidak merusak habitat tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya, tidak membahayakan nelayan, menghasilkan ikan yang bermutu baik, hasil tangkapan yang terbuang minimum, alat tangkap yang digunakan harus memberikan dampak minimum terhadap keanekaragaman sumberdaya hayati (*biodiversity*), tidak menangkap jenis ikan yang dilindungi Undang-Undang atau terancam punah, dan terakhir diterima secara sosial yang artinya dimasyarakat nelayan tidak menimbulkan konflik.

Sedangkan kriteria alat tangkap ikan yang dilarang adalah kebalikannya yaitu; tidak selektif atau memiliki selektivitas yang rendah, merusak habitat tempat tinggal dan berkembang biak ikan dan organisme lainnya, membahayakan nelayan, hasil tangkapan ikan yang terbuang maximum (banyak), alat tangkap yang menangkap jenis ikan yang dilindungi Undang-Undang atau yang terancam punah.

Kebijakan pada dasarnya berupaya mengakomodasi berbagai kepentingan (khususnya yang dominan) sehingga ketika telah terformulasi sebagai sebuah peraturan maka akan mereduksi banyak hal secara detail dari fenomena sehari-hari. Menurut Shaukani, (2005) setelah suatu kebijakan itu dibuat dan ditetapkan atau diundangkan proses selanjutnya yaitu sosialisasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan.

- a. Sosialisasi adalah penyebarluasan informasi (program, peraturan, kebijakan) dari satu pihak (pemilik program) ke pihak lain (masyarakat umum) dan proses pemberdayaan, dimana diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran kritis, menumbuhkan perubahan sikap, dan perilaku masyarakat. Adapun tujuan sosialisasi secara umum adalah mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasi makna dari konsep dan tujuan dari kebijakan pemerintah, masyarakat luas mengetahui dan memahami perkembangan pelaksanaan program pemerintah sebagai bagian dari pertanggungjawaban terhadap publik, menjadi bagian dari

kegiatankegiatan pemberdayaan yang terdapat dalam siklus program dari kebijakan pemerintah.

- b. Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik dalam sebuah negara. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas, termasuk tujuan jangka pendek, menengah dan panjang. Dari pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang telah diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, pertama seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. kedua, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan kegiatan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut. dan yang terakhir adalah bagaimana mengantarkan kebijakan secara kongkrit kepada masyarakat
- c. Evaluasi kebijakan dilakukan untuk menilai sejauhmana keefektifan kebijakan publik untuk dipertanggungjawabkan kepada publiknya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Evaluasi dibutuhkan untuk melihat kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Dengan demikian, evaluasi kebijakan

1. Mengenal dan menghormati orang lain di sosial
2. Bergaul dengan orang lain dan mampu mengembangkan sifat bersahabat, keduanya diperlukan untuk penyesuaian sosial yang efektif.
3. Penyesuaian sosial yang menarik dan dukungan untuk kesejahteraan orang lain.
4. Bersikap hormat terhadap hukum, tradisi, dan adat istiadat. Adanya kesadaran untuk mematuhi dan menghormati peraturan dan tradisi yang berlaku di lingkungan maka ia akan dapat diterima dengan baik dilingkungannya.

interview adalah cara yang dicakup oleh seseorang untuk suatu tugas tertentu, mencoba mendapatkan keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap berhadapan muka dengan orang itu (Koentjaningrat, 1990).

Pada umumnya, wawancara dalam penelitian kualitatif ataupun wawancara lainnya terdiri atas tiga bentuk, yakni wawancara terstruktur, wawancara semi-terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur (Haris, 2011). Wawancara terstruktur atau lebih erin digunakan dalam peneitian survey ataupun penelitian kuantitatif walaupun dalam beberapa situasi, wawancara terstruktur juga dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara ini terkesan kaku dan berdampak pertukaran informasi antara peneliti dengan subyek yang diteliti sangat minim. Wawancara semi terstruktur atau lebih tepat jika jika dilakukan pada penelitian kualitatif daripada penelitian lainnya karena memiliki kriteria pertanyaan terbuka, fleksibel, tetap terkontrol dengan patokan pedoman wawancara, serta lebih memahami fenomena. Sedangkan wawancara tidak terstruktur pertanyaannya terbuka, sangat fleksibel, pedoman wawancara sangat longgar, dan tetap ingin memahami suatu fenomena.

Peneliti kali ini menggunakan wawancara semi terstruktur karena peneliti mengorek informasi secara terbuka dengan informan namun tetap pada alur dan pedoman wawancara. Selain itu, menggunakan metode wawancara semi terstruktur ini akan lebih mendalam serta fleksibel tanpa keluar dari jalur tema yang ingin diteliti.

data yang sudah disebutkan diatas, dapat dilakukan dengan cara sebagai Trianggulasi data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Diluar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data. Triangulasi merupakan pengecekan data diri berbagai sumber dengan berbagai cara dan waktu. Triangulasi dibagi menjadi tiga macam yaitu :

- a. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai sumber.
- b. Triangulasi teknik, dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, kemudian dicetak dengan observasi dan dokumentasi.
- c. Triangulasi waktu, dilakukan dengan cara melakukan pengecekan melalui wawancara, observasi dalam waktu dan situasi yang berbeda (Moloeng, 2006).

Adapun validasi data dengan triangulasi dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yakni melalui *significant others* seperti Rukun nelayan, keluarga subyek, maupun masyarakat sekitar.

Pertanyaan yang diajukan kepada subyek ketiga terkait ketaatan terhadap larangan penggunaan cantrang, sebagaimana hasil wawancara berikut berikut:

Piye yo, yo aku gak setuju polae ket biyen kan wes ono cantrang la saiki moro moro dilanrang iku piye
(BD.14.SU.19052018)

(bagaimana ya, aku tidak setuju karena dari dulu sudah ada cantrang lalu sekarang cantrang tiba tiba dilarang)

Pertanyaan yang diajukan kepada significant others pertama terkait ketaatan terhadap larangan penggunaan cantrang, sebagaimana hasil wawancara berikut berikut:

Antara setuju dan tidak setuju, setuju nya memang itu bisa berdampak baik untuk laut kita tapi tidak setuju nya bagaimana nasib nelayan kedepan jika alat yang sudah membudaya sejak dulu tiba-tiba dilarang pasti kebingungan mereka

Pertanyaan yang diajukan kepada significant others kedua terkait ketaatan terhadap larangan penggunaan cantrang, sebagaimana hasil wawancara berikut berikut:

Pastinya tidak setuju karena melihat dari penghasilan yang didapatkan, kadang hasil yang

Banyak sekali kerugian dan dampaknya pasti, karena ketika nelayan tidak bisa mendapatkan hasil yang baik dari kegiatan melautnya maka seluruh perputaran uang yang ada di sini pun akan ikut turun, karena orang disini sangat bergantung pada hasil kerja nelayan.

Pertanyaan yang diajukan kepada significant others kedua terkait kerugian jika tidak memakai cantrang, sebagaimana hasil wawancara berikut berikut:

Jadi orang-orang disini kan kebanyakan nelayan jadi perputaran uangnya itu berawal dari nelayan kalau misal nelayan lagi sepi maka tidak ada yang jajan keluar, pasti orang yang jualan di jalan itu juga sepi karena karena yang pasti beli itu dari keluarga nelayan. Kemarin saja dua bulan nelayan tidak berani melaut karena di dalarang pakai cantrang kemarin itu pasar juga sepi, penjual-penjual juga pada nesu dagangannya gak laku. Jadi dampaknya besar tidak hanya nelayan saja yang terkena

c. Kerugian jika tidak memakai cantrang

Analisis temuan penelitian terkait kerugian tidak memakai cantrang dari seluruh responden menjawab terdapat penurunan dari penghasilan yang didapat, dan dari penghasilan nelayan yang menurun akan berdampak pada pedagang pedagang yang lain. Penghasilan nelayan yang merupakan sumber perputaran uang sangat mempengaruhi pola perekonomian yang ada di desa Blimbing, karena mayoritas masyarakat disana adalah beprofesi sebagai nelayan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perekonomian yang ada di desa Blimbing mengikuti hasil dari pendapatan nelayan.

d. Penyesuaian terhadap larangan penggunaan jaring cantrang

Analisis temuan penelitian tentang penyesuaian terhadap larangan penggunaan jaring cantrang, dari hasil di lapangan nelayan tetap ingin menggunakan alat tangkap cantrang karena pendapatan yang dihasilkan menjanjikan, tetapi nelayan mau untuk mengganti alat tangkap yang hasil pendapatannya tidak jauh-jauh dari alat tangkap cantrang. Terdapat ketersediaan oleh nelayan untuk menggunakan alat tangkap selain cantrang asalkan alat yang digunakan tidak jauh dari hasil tangkap saat menggunakan cantrang.

Analisis temuan lain dari penelitian terkait faktor yang mempengaruhi penyesuaian sosial adalah kebutuhan keluarga, karena penghasilan yang didapat oleh nelayan adalah untuk memenuhi kebutuhan keluarga, seperti yang dikatakan oleh subyek kedua bahwa ketidak bersediaan untuk mengganti alat cantrang adalah karena di khawatirkan tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan keluarga.

Temuan selanjutnya di lapangan terkait alasan menggunakan cantrang adalah karena cantrang merupakan satu-satunya alat yang dimiliki nelayan yang dapat menghasilkan penghasilan lebih dari pada alat tangkap yang lain, selain menggunakan cantrang penghasilan yang didapat oleh nelayan akan mengalami penurunan, dan dari penurunan penghasilan maka hal itu pun berdampak pada kehidupan nelayan.

Temuan yang lain di lapangan berdasarkan ketidak bersediaan nelayan mengganti alat tangkap cantrang adalah karena keahlian nelayan dalam bekerja hanya terpaku pada cantrang saja, sehingga ketika cantrang dilarang nelayan merasa kebingungan dalam pekerjaannya, hal ini menjadi salah satu faktor nelayan tidak mau terlepas dengan cantrang.

Temuan lain di lapangan terkait penyesuaian sosial nelayan terhadap larangan penggunaan jaring cantrang adalah ketidak siapan nelayan dengan larangan tersebut dikarenakan cantrang

C. Pembahasan

Berdasarkan dari fokus penelitian ini maka dapat disampaikan tentang temuan dilapangan bahwa terdapat dua respon dari nelayan terkait peraturan larangan penggunaan cantrang. Respon pertama adalah nelayan tetap ingin menggunakan cantrang atau tidak adanya adaptasi yang dilakukan oleh nelayan terkait larangan penggunaan cantrang. Respon kedua dari nelayan adalah nelayan mau untuk mengganti alat tangkap cantrang, disini terdapat adaptasi yang dilakukan oleh nelayan.

Keputusan nelayan untuk tetap menggunakan cantrang, karena cantrang merupakan kebutuhan (*Need*) bagi para nelayan. Minimnya skill yang dimiliki oleh nelayan juga menjadi sebab nelayan sangat bergantung pada cantrang. Menurut nelayan cantrang adalah alat yang dapat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Seperti yang dikatakan oleh Abraham Maslow dalam (Setiawan, 2014), Bahwa setiap individu memiliki kebutuhan diantaranya kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk merasa memiliki, kebutuhan akan harga diri dan kebutuhan untuk mengaktualisasikan diri. Kebutuhan ekonomi termasuk kebutuhan yang utama yang didahulukan oleh nelayan, seperti yang dipaparkan oleh (Kinichi, 2008), bahwa pertimbangan dalam mengkonsumsi adalah berdasarkan kebutuhan yang paling dasar terlebih dahulu, ketika kebutuhan yang paling dasar sudah terpenuhi maka kebutuhan yang memiliki tingkatan yang lebih tinggi akan muncul.

Dari aspek pengetahuan (*knowledge*) menurut nelayan cantrang bukanlah alat yang dapat merusak lingkungan, hal ini yang membuat nelayan tidak melakukan adaptasi dan tetap ingin menggunakan cantrang. Peraturan larangan penggunaan cantrang juga menurut nelayan tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu sehingga nelayan enggan untuk mengganti alat tangkap.

Dari aspek keyakinan (*belief*) nelayan meyakini bahwa adalah cantrang satu-satunya alat yang dapat memuaskan hasil pendapatan nelayan. Respon nelayan terhadap larangan penggunaan cantrang juga diyakini bahwa dari sekian banyak nelayan tidak akan beradaptasi dengan peraturan tersebut.

Pada dasarnya kemampuan menyesuaikan diri telah dimiliki oleh setiap individu, namun kemampuan tersebut berbeda antar individu. Hal ini, dikarenakan proses penyesuaian sosial yang dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yakni faktor personal, sosial, finansial, dan edukasi (Gajdzik, 2005). Faktor finansial yang menjadi salah satu faktor nelayan tidak bisa untuk melakukan penyesuaian sosial terhadap aturan larangan penggunaan cantrang. Kepuasan nelayan terlihat dari penghasilan yang di dapatkannya, dan cantrang adalah alat yang dapat memberikan kepuasan pada nelayan dari hasil pekerjaannya.

Dalam hal ini nelayan tentunya mengalami pertimbangan yang mendalam hingga tetap mengambil keputusan untuk menggunakan cantrang. Pertimbangan tersebut seperti yang dikatakan oleh Gibson, dkk

(1997) bahwa pengambilan keputusan sebagai proses pemikiran dan pertimbangan yang mendalam yang dihasilkan dalam sebuah keputusan. Pengambilan keputusan merupakan proses dinamis yang dipengaruhi oleh banyak kekuatan hingga sampailah pada keputusan yang sesuai dengan kebutuhan.

Faktor-faktor pengambilan keputusan menurut Kotler (2003), a) Faktor Budaya, yang meliputi peran budaya, sub budaya dan kelas sosial. b) Faktor Sosial, yang meliputi kelompok acuan, keluarga, peran dan status. c) Faktor Pribadi, yang termasuk usia dan tahap siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian dan konsep diri. d) Faktor Psikologi, yang meliputi motivasi, persepsi, pengetahuan, keyakinan dan pendirian.

Cantrang walaupun nantinya akan dilarang oleh pemerintah dan mengharuskan nelayan untuk memakai alat yang lain, jika nanti alat yang sebagai ganti dari cantrang tidak bisa untuk memenuhi target penghasilan maka seperti yang ungkapkan salah satu subyek bahwa nelayan pada akhirnya akan memodifikasi alat tangkap yang baru tersebut agar dapat sesuai dengan target penghasilan. Seperti alat tangkap yang dimiliki dulu yang sekarang di modifikasi oleh nelayan menjadi cantrang.

Hal ini dikarenakan nelayan akan berupaya agar tetap bisa *survive* dengan kehidupannya sebagai nelayan yang menjadi satu-satunya keahlian yang dimiliki. Seperti yang dikatakan oleh Suharto (2009), bahwa strategi bertahan hidup sebagai kemampuan seseorang dalam menerapkan

seperangkat cara untuk mengatasi berbagai permasalahan yang melingkupi kehidupannya.

Nelayan dalam menanggapi larangan penggunaan cantrang dipastikan mengalami proses pengambilan keputusan yang berat. Proses tersebut dipengaruhi oleh finansial yang menjadi alasan utama, sehingga nelayan jika tidak menggunakan cantrang maka penghasilan yang didapatkan akan mengalami penurunan. Jika nantinya nelayan tetap diharuskan untuk mengganti alat tangkap cantrang dan penghasilan dari alat tersebut tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan ekonominya maka sebagai strategi survival yang dilakukan nelayan adalah dengan memodifikasi alat tangkap tersebut agar dapat mencukupi kebutuhan ekonominya.

- Jones, Charles O. (1996). *Pengantar Kebijakan Publik*. Ed. 1. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada.
- Kalita G J, Sarma P K, Goswami P, Rout S. (2015). *Socio-economic status of fishermen and different fishing gear used in Beki River, Barpeta, Assam*. Journal of entomology dan zoology studies.
- Kinicki, Angelo & Robert, Kreitner. (2008). *Organizational Behavior*. USA: McGraw-Hill Irwin
- Koentjaningrat. (1990). *Metode-metode penelitian Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Media.
- Kumar, Ranjit. 1999. *Research Methodology*. London: SAGE Publications.
- Mappiare, A. (1982). *Psikologi Remaja*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Mu'tadin, Z. (2002). *Penyesuaian Diri Remaja*.
- Mulyadi. (2007). *Ekonomi Kelautan*. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya, 2009.
- Miles M. B. & A. Michael H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Nawawi, Hadari. (2003). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta:Gajah Mada University Press.
- Satria A. (2015). *Pengantar Sosiologi Masyarakat Pesisir*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Schneiders, A. (1964). *Personal Adjustment and Mental Health*. New York: Rinehart & Winston.
- Seidel, J.V. (1998), *Qualitative Data Analysis*.
- Setiawan, Hendro. (2014). *Manusia Utuh, Sebuah Kajian Atas Pemikiran Abraham Maslow*. Yogyakarta: Kanisius.
- Sugiyono. (2008). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syaukani, dkk. (2005). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2005.
- Wahyuningsih, Elizabeth T. Gurning, dan Edhie Wuryanto. (1997). *Budaya Kerja Nelayan Indonesia di Jawa Tengah (Kasus Masyarakat Nelayan Desa Wonokerto Kulon Kecamatan Wiradesa. Kabupaten Pekalongan)*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Direktorat Jenderal

